



## Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Ayu Fitriana<sup>1</sup>, Muna Sofiana<sup>2</sup>, Siti Nahdiatun Nisa<sup>3</sup>, Satria Putra Arsibal<sup>4</sup>, Novi Khoiriawati<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No. 46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: [arsibalsatria859@gmail.com](mailto:arsibalsatria859@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *The role of Micro Sharia Financial Institutions in overcoming poverty in Indonesia is needed through the financial services that have been provided. Indonesia has been intensively trying to overcome poverty because one of the main goals of national development is to reduce and even eliminate poverty. In March 2023 the number of poor people in Indonesia has decreased to 25.90 million people. The purpose of this research is to describe the role of Sharia Microfinance Institutions in alleviating poverty in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative approach research method with secondary data obtained from books, journals, and data sources related to the study under study. The results of this study found that Micro Sharia Financial Institutions in the form of BMT (Baitul Maal wat Tamwil) have a very large role in poverty alleviation in Indonesia. Capital from BMT will be channeled to small communities so as to open up opportunities in creating jobs and alleviating poverty.*

**Keywords:** BMT, Poverty, Micro Sharia Financial Institutions

**Abstrak.** Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia sangat diperlukan melalui layanan keuangan yang telah disediakan. Indonesia telah secara intensif berusaha untuk mengatasi kemiskinan karena salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah menurunkan bahkan menghapuskan kemiskinan. Pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan mencapai 25,90 juta orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif diskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber data yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Lembaga Keuangan Syariah berupa BMT (Baitul Maal wat Tamwil) memiliki peran yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Modal dari BMT akan dialirkan ke masyarakat kecil sehingga membuka peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan.

**Kata kunci:** BMT, Kemiskinan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

### LATAR BELAKANG

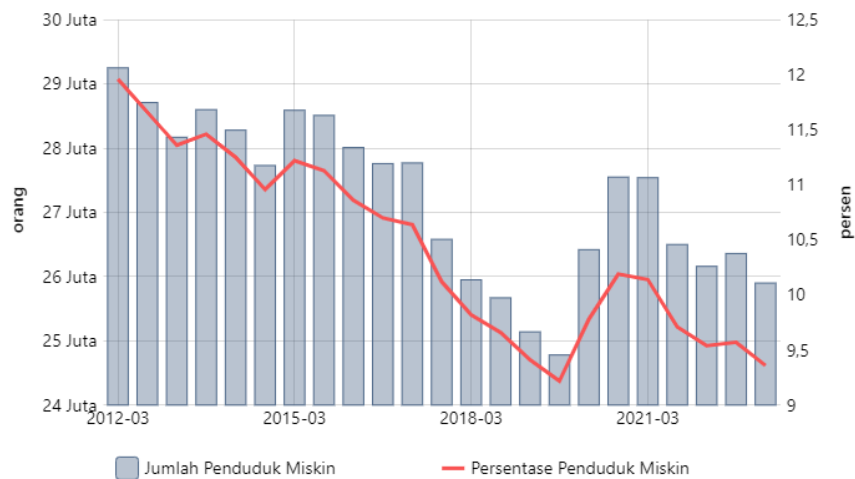
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi semua negara di dunia yang memiliki tantangan moral yang sangat besar. Di dalam prespektif islam kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek material tapi juga dari sisi moral dan spiritual, oleh karena itu strategi pengentasan kemiskinan harus memperhatikan kedua aspek tersebut. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, 2020, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan layak, dimana tingkat ekonomi dan sosial dalam hal ini menentukan garis nasib seseorang dengan pendapatan maupun pengeluaran yang kurang dapat dikategorikan miskin. Penurunan tingkat perekonomian masih menjadi penyebab naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia, kemudian tingkat produktivitas

*Received April 19, 2024; Accepted Mei 23, 2024; Published Juli 30, 2024*

\*Satria Putra Arsibal, [arsibalsatria859@gmail.com](mailto:arsibalsatria859@gmail.com)

masyarakat pun mempengaruhi pendapatan yang diperoleh sehingga menyebabkan ketidakefektifan bagi peningkatan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan mencapai 25,90 juta orang. Sementara pada September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Dibandingkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk dalam kemiskinan pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36 persen, mengalami penurunan dari bulan Maret 2022 0,18 persen dan pada september 2022 sebesar 0,21 persen.



Sumber: DataIndonesia.id (2023).

**Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia (Maret 2012–Maret 2023)**

Lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu perekonomian masyarakat serta dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan fungsi lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai pelayanan transaksi. Lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti kemudahan transaksi, menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan agenda keuangan. Selain itu penerapan sistem non bunga serta prinsip dan kerja operasionalnya yang terintegrasi dengan nilai sosial. Menurut Sudjana & Rizkison (2020), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip keuangan syariah. BMT memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat Islam dengan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dan panduan dalam mengatur aspek keuangan, termasuk dalam operasionalnya. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki pedoman dalam mengatur aspek keuangan dalam

operasionalnya, dasar hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdapat dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarag ayat 88)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**Artinya:** Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dua peran yang berbeda, yakni sebagai Baitul Maal yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah, serta sebagai Baitu Tamwil yang melakukan kegiatan usaha berskala mikro. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) didasarkan paa prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan memiliki tujuan memberikan pelayanan keuangan yang adil dan berkelanjutan serta membangun komunitas yang sejahtera secara ekonomi.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial seperti zakat, infak serta sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba atau keuntungan dengan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka.

Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional, namun ada beberapa perbedaan dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga. Melalui sistem syariah ini dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaha kecil dengan menggunakan sistem profit sharing.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, LKMS juga mengikuti konsep produk pada produk jasa yang diberikan. LKMS lebih leksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan Bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas. LKMS juga diharapkan bisa sebagai suatu solusi alternatif yang ampuh sebagai pilihan bagi masyarakat. LKMS terbilang mengalami perkembangan paling menonjol selama

lima belas tahun terakhir, jika dibandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seorang individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sering disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Ini adalah masalah global yang menjadi penghalang sosial, memengaruhi interaksi dan komunikasi antara kelas sosial. Kemiskinan adalah masalah sosial yang krusial yang harus diminimalisir bahkan dihapuskan dalam masyarakat. Tanpa upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi kemiskinan, sebuah bangsa atau negara akan mengalami keterbelakangan dalam pembangunan fisik, pengembangan sumber daya manusia, dan kemajuan ekonomi, sehingga rentan dikuasai oleh negara-negara yang lebih maju.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat data-data yang telah diperoleh. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur. Dalam penelitian ini tidak perlu menggunakan observasi atau eksperimen. Jadi hanya butuh sumber-sumber yang berupa data saja. Dengan pokok permasalahan yang dikaji tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.

Sumber data merupakan subjek yang digunakan peneliti sebagai bahan penelitian. Dari segi pengumpulan data sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

Teknik analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Proses analisis data peneliti ini terbagi menjadi tiga yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kemiskinan Di Indonesia**

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 mencapai 9,36 persen. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 pemerintah telah menetapkan angka kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 persen. Kemiskinan, sebagai akar masalah, memunculkan berbagai dampak negatif seperti kelaparan, buruknya tingkat kesehatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Indonesia telah berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan karena salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah menurunkan bahkan menghapuskan kemiskinan. Meskipun demikian, kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan bantuan, namun masih belum optimal dalam menangani kemiskinan. Meskipun telah mengantisipasi peningkatan jumlah masyarakat miskin, tantangan tersebut tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada serta kemungkinan adopsi kebijakan baru yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

Dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 ada dua kerangka kebijakan dalam upaya mengatasi kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu mempertahankan stabilitas inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengatur regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta membangun infrastruktur di daerah-daerah terpinggirkan. Sementara itu, dalam kerangka kebijakan mikro, upaya untuk mengurangi kemiskinan dibagi menjadi dua strategi utama. Pertama, penyempurnaan kebijakan bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Kedua, strategi ini melibatkan pengembangan program ekonomi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan sehingga mereka tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk mendanai inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Dengan kombinasi dari rencana tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk naik kelas menjadi kelompok ekonomi menengah.

Menurut Badan Resmi Statistik ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode September 2022–Maret 2023 antara lain adalah:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 sebesar 5,45 persen, jika dibandingkan TPT pada Agustus 2022 sebesar 5,86 persen.
2. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 110,85, dibandingkan September 2022 yang sebesar 106,82.
3. Penurunan laju inflasi pada September 2022 – Maret 2023 sebesar 1,32, jika dibandingkan inflasi pada periode Maret 2022–September 2022 sebesar 3,60.
4. Konsumsi rumah tangga pada Triwulan I tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan III tahun 2022 sebesar 2,21 persen.
5. Upaya bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Tingkat pemanfaatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Triwulan I tahun 2023 mencapai 89,3 persen, sementara tingkat pemanfaatan bansos Sembako tahap 1 telah mencapai 86,5 persen.

### **Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau lembaga keuangan rakyat, disebut demikian karena salah satu tujuan didirikannya LKM adalah untuk memberikan kepada masyarakat akses keuangan (simpan-pinjam) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) yang memiliki penghasilan rendah. Jika dilihat perkembangan LKM, baik perbankan ataupun non perbankan cukup pesat, misalnya dari selalu bertambahnya jumlah unit lembaga setiap tahunnya, produk dan akad yang ditawarkan juga semakin banyak, demikian halnya dengan volume transaksi di LKM dan aktivitas yang berada di dalamnya. Salah satu LKM tersebut yaitu BMT.

Menurut KNEKS (2019), perkembangan BMT di Indonesia yang progresif tidak terlepas dari besarnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total penduduk sekitar 265 juta jiwa, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% tergolong sebagai kelas bawah, ditambah sekitar 25,67 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sejalan dengan mayoritas masyarakat, yaitu melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Hal tersebut menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 4.500 unit BMT yang berdiri di Indonesia. Sejumlah 3.200 BMT yang memiliki jumlah aset mencapai Rp 3,2 triliun. Diperkirakan usaha tersebut diproyeksi mencapai Rp 3,8 triliun pada akhir tahun ini. Berdasarkan jumlah di atas, kurang lebih 60% BMT dalam kategori aktif, dan 1.000 BMT dalam kategori normal. Tergolong sedikit BMT yang memiliki aset di bawah Rp 100 juta yang biasanya dimiliki oleh BMT yang baru didirikan. Berdasarkan angka- angka tersebut, aset BMT masih kecil dari pada bank syariah, tetapi peran BMT sangat penting dalam

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkembangan ekonomi nasional harus dilakukan secara harmonis oleh masyarakat melalui pembentukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), dan meningkatkan dana sosial syariah. Inilah yang membuat keberadaan BMT diterima secara terbuka oleh masyarakat Indonesia.

### **Pengembangan Jenis Kegiatan usaha**

Kegiatan usaha BMT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada Bab VII Pasal 19 Kegiatan Usaha, seiring dengan perkembangan teknologi finansial (fintech) yang semakin luas dipergunakan perlu adanya pengembangan kegiatan usaha BMT berupa pemberian layanan transaksi keuangan dengan bertindak sebagai agen dari penyelenggara resmi layanan transaksi keuangan berbasis teknologi finansial, yaitu: agen pengiriman uang, agen penerimaan pembayaran tagihan (telepon, listrik, PAM, dll), agen dalam mempertemukan antara pemilik dana (investor) dengan pelaku usahanya, agen penjualan produk lembaga keuangan lainnya, agen penjualan produk-produk anggota dengan sesama anggota maupun masyarakat, pengelolaan usaha inti (core business) koperasi melalui badan usaha terafiliasi dari BMT. Sesuai karakteristiknya sebagai badan hukum koperasi, maka pengembangan dan inovasi terhadap produk dan layanan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dapat dilakukan lebih fleksibel. Pengembangan dan inovasi produk pendanaan agar efisien dan efektif dapat dilakukan oleh asosiasi atau lembaga APEX bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengembangan aktivitas akses pendanaan juga pada program-program linkage penyaluran dana dari kreditur, pemberian donor/hibah dan lainnya.

### **Pengembangan Pedoman Standar Operasional dan Sistem Pengendalian Internal**

Pelayanan dan operasional BMT sangat bervariasi, baik dari segi kompleksitas maupun volume usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman operasional sesuai kebutuhan dan tingkat kompleksitas masing-masing. Pedoman standar tata kelola operasional akan merujuk pada standar-standar yang dikeluarkan oleh regulator dan praktik-praktik terbaik (best practices) pengelolaan BMT, serta standar-standar yang berlaku seperti Fatwa DSN-MUI dan PSAK. Kemenkop dan UKM telah menerbitkan beberapa peraturan yang berisi pedoman operasional BMT antara lain: Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, dan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Tersedianya pedoman standar yang mencakup pedoman standar sistem pengendalian internal, pedoman standar operasional dan pedoman standar akuntansi, akan memberikan manfaat optimal bagi pengelola BMT,

membantu pencapaian tingkat kesehatan operasional dan keuangan BMT yang lebih baik, serta menjadi bagian signifikan untuk menciptakan industri BMT yang kuat. Dengan demikian, diupayakan agar kualitas manajemen dan operasional BMT lebih baik atau setidaknya sebanding dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional BMT sebagai lembaga keuangan. Untuk memastikan dan menjamin seluruh proses operasional dan fungsi manajemen BMT berjalan dengan efektif dan efisien memerlukan adanya sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme pengawasan yang efektif oleh manajemen yang bertujuan membentuk BMT yang kuat, sehat, transparan dan akuntabel, serta melindungi aset BMT dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada umumnya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan usaha BMT dan faktor terjadinya fraud, antara lain: a) Akuntabilitas dan kewenangan pengurus yang tidak jelas. b) Lemahnya sistem pengendalian seperti belum adanya dual control, pemisahan fungsi dan verifikasi dalam operasional BMT. c) Kurang memadai kegiatan pengawasan dan audit internal. d) Tidak dapat menerapkan sanksi yang tegas. Mengingat sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dan menjadi dasar kegiatan operasional BMT yang kuat, sehat, transparan, dan akuntabel, serta mengurangi terjadinya risiko kerugian dan penyimpangan, maka perlu adanya penyusunan standar sistem pengendalian internal BMT. Sistem pengendalian internal sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh pengawas, pengurus dan pengelola, budaya pengendalian, kegiatan pengendalian, sistem akuntansi dan pemisahan fungsi.

### **Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Ashari (2006), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usahanya berada pada kategori mikro. Lembaga tersebut sebenarnya telah banyah tumbuh dan mengakar pada masyarakat pedesaan, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan pada pemberdayaan masyarakat melalui ketersediaan layanan keuangan. Dengan ketersediaan akses keuangan bagi mereka yang kesulitan mengakses bank, lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam menghentikan mata rantai kemiskinan. Lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran dalam pemerataan ekonomi. Dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat miskin, lembaga ini membuka peluang untuk menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan



kesejahteraan bagi mereka. Kerjasama dengan perbankan syariah juga membantu dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih luas.

Baitul Maal Tamwil merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang mulai hangat diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. BMT telah tumbuh menjadi sebuah alternatif dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Peran BMT sudah mulai terasa untuk mengentaskan kemiskinan, jika BMT dan pengelolaanya terus melakukan perbaikan yang lebih serius dalam pemberdayaan masyarakat LKMS BMT memiliki fungsi sosial dengan mengumpulkan titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan berkembangnya BMT di Indonesia, BMT mulai didatangi pengusaha kecil dan mikro untuk melakukan pembiayaan. Modal dari BMT akan dialirkan ke masyarakat kecil, dan membuka peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sejak tahun 2015 Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT telah mengalami peningkatan signifikan, BMT dapat menyalurkan kredit sebesar 1,9 persen dari jumlah kredit di Bank Indonesia. Menurut Arum Setyowati (2010), kredit mikro atau pembiayaan mikro bertujuan untuk mendukung proyek yang dijalankan oleh pelaku usaha sendiri demi menghasilkan pendapatan yang bisa memperhatikan kesejahteraan diri dan keluarga mereka. BMT menyalurkan kepada pengusaha skala kecil dan mikro (UMKM) karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja. Dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro, ini dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengatasi kemiskinan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, terutama Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peran utamanya adalah menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses layanan perbankan formal. Melalui pembiayaan yang disalurkan, BMT membantu masyarakat miskin untuk membuka dan mengembangkan usaha kecil, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain penyaluran dana, BMT juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh agar lebih mandiri secara ekonomi. Kehadiran BMT menjadi solusi bagi permasalahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang selama ini dianggap tidak bankable oleh lembaga keuangan formal. Dengan prinsip syariah yang menghindari riba, BMT menawarkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat miskin. Keberadaan BMT di

tengah masyarakat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afwa, M. S., & Sulistyowati. (2023). Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di tengah persaingan lembaga keuangan syariah bank dan non bank (Studi kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 53-66.
- Ahmad, M. (2022). Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), 120-129.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Berita Resmi Statistik*, No. 47/07/Th. XXVI.
- Fiantika, F. R., et al. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2023). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) prespektif Al-Qur'an. *Ujuja: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 7(2), 65-85.
- Hasan, H. A. (2019). Pengentasan kemiskinan dengan keuangan mikro syariah. *Journal Hukum Syariah*, 1(1), 50-63.
- Hidayat, A. (2023). Penduduk miskin Indonesia berkurang pada Maret 2023, terendah sejak pandemi. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/17/penduduk-miskin-indonesia-berkurang-pada-maret-2023-terendah-sejak-pandemi>
- Istan, M. (2017). Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat menurut perspektif Islam. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81-99.
- Khoirunnisa, D., et al. (2023). Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil sebagai pilar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 361-371.
- KNEKS. (2019). Sharing platform keuangan mikro syariah berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Retrieved from <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (n.d.). Strategi pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia. Retrieved from [https://kneks.go.id/storage/upload/1579667043-Strategi%20Pengembangan%20Keuangan%20Mikro%20Syariah%20Di%20Indonesia%20\(Rekomendasi%20Kebijakan\)%20-%20KNKS.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1579667043-Strategi%20Pengembangan%20Keuangan%20Mikro%20Syariah%20Di%20Indonesia%20(Rekomendasi%20Kebijakan)%20-%20KNKS.pdf)
- L. Qadariyah, & A. R. E. Permata. (2017). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam perekonomian di Indonesia: Studi teoritik dan empirik. *Dinar: Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1).

- Muljadi. (2013). Prospektif Baitul Maal Wat Tamwil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 1(1).
- Nasrullah, A. (2020). Analisis perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 19(2), 233-245.
- Nurdin, S. T., & Oktafia, R. (2017). Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam mengatasi kemiskinan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 1(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2014). Pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 157-173.
- Suaidah, & Arjun, D. (2023). Peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 2(1), 75-83.
- Wakil Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Targetkan penurunan angka kemiskinan 7,5 persen di 2024, Wapres minta K/L terkait optimalkan program dan anggaran. Retrieved from <https://www.wapresri.go.id/id/targetkan-penurunan-angka-kemiskinan-75-persen-di-2024-wapres-minta-k-l-terkait-optimalkan-program-dan-anggaran/>
- Yogasnumurti, R. R., et al. (2023). Upaya pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan. *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 83-94.
- Zubair, M. K. (2016). Analisis faktor-faktor sustainabilitas lembaga keuangan mikro syariah. *Iqtishadia*, 9(2), 201-226.